

ANALISA KINERJA KEUANGAN DAERAH DALAM PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2007-2012

Zalmi

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pasaman Simpang Empat Pasaman Barat

Jln. Pujarahayu Ophir, 26368. Email : zalmi.se@yahoo.com

Diterima 22 Maret 2014

Disetujui 20 April 2014

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan : (1) apakah Kabupaten Pasaman Barat Mandiri dalam melaksanakan kebijakan otonomi daerah pada tahun 2001-2012 (2) sejauh mana tingkat kemandirian Kabupaten Pasaman Barat setelah Pemekaran pada tahun 2007-2012. Metode analisis yang digunakan adalah analisis domain, analisis toksonomi, analisis komponesial dan analisis tema budaya. Hasil penelitian didapatkan Kinerja keuangan daerah di lihat dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), selalu terjadi peningkatan Pendapatan setiap tahunnya. pendapatan asli daerah yang paling dominan atau besar kontribusinya adalah dari pajak penerangan jalan memberikan kontribusi terhadap (PAD) sebesar 11,23 % , dan yang kedua adalah Pajak Restoran memberikan kontribusi terhadap (PAD) 3,40 % ,Pajak sarang burung walet sebesar 3,20 % . Dan dari retribusi yang paling besar kontribusinya adalah retribusi pelayanan kesehatan (RSUD) memberikan kontribusi sebesar 4,5 % , serta legalisasi daerah 3,91 % dan dari pendapatan lain yang sah yaitu pendapatan jasa giro sebesar 26,08 % dan pendapatan bunga deposito sebesar 16,23 % , sementara yang paling kecil kontribusinya adalah dari pajak hotel dan hiburan serta izin usaha perikanan setiap tahunnya tidak mencapai target.

Kata Kunci: Kinerja, Keuangan, Otonomi

PENDAHULUAN

Pembangunan daerah sebagai integral dari pembangunan nasional diarahkan untuk menyeimbangkan dan menyetarakan laju pertumbuhan antar daerah, antar desa dan antar sektor. Pelaksanaan pembangunan diupayakan berjalan seimbang selaras dan saling menunjang antar satu bidang pembangunan ditujukan untuk meningkatkan taraf kesejahteraan rakyat. Satu hal penting yang harus diperhatikan dalam pembangunan daerah, yaitu harus tetap mengacu kepada pola pembangunan nasional dan tujuan pembangunan nasional.

Pelaksanaan pembangunan daerah selain dilaksanakan oleh pemerintah pusat juga dilakukan oleh pemerintah daerah serta masyarakat yang ada di sekitar daerah tersebut. Hal ini sesuai dengan prinsip yang dianut dalam UU No. 22 tahun 1999 yang mengatur tentang pemerintahan daerah, diperbaharui dan disempurnakan dengan UU No 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah

Dalam rangka mengantisipasi dan melaksanakan otonomi daerah secara baik, sesuai dengan prinsip *Good Government* beberapa upaya harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Keberhasilan otonomi daerah tidak terlepas dari kemampuan daerah dalam bidang keuangan yang merupakan salah satu indikator penting dalam menghadapi otonomi daerah. Untuk itu perlu ditingkatkan Penerimaan Daerah yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah.

Penerimaan yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari kekayaan daerah yang memadai, penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, penerimaan dinas serta penerimaan lain, dapat berhasil dan berdaya guna atau tidak, tergantung pada kebijakan pemerintah daerah, oleh sebab itu pemerintah daerah perlu mengambil kebijakan untuk menentukan sumber PAD mana yang ditingkatkan dan yang mana yang harus dibina. Diharapkan dengan meningkatnya PAD maka akan meningkat pula APBD yang akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut.

Kabupaten Pasaman Barat yang berdiri tanggal 7 Januari 2004 pada tahun 2010 hasil pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan adalah Wajar Dengan Pengecualian atas prestasi itu Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat mendapat reward dari Pemerintah Pusat sebesar 19 milyar karena pada tiga tahun sebelumnya hasil pemeriksaan badan pemeriksa keuangan adalah disklaimer dan merupakan suatu prestasi yang membanggakan bagi kabupaten Pasaman Barat. Untuk Tahun 2011 penyampaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) ke Dirjen Perimbangan Keuangan (Menteri Keuangan RI) dan Dirjen Bina Administrasi Keuangan Daerah (Menteri Dalam Negeri) Kabupaten Pasaman Barat pertama Se-propinsi Sumatera Barat dan pertama se - Indonesia.

Untuk tahun 2011 penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pasaman Barat Rp 28,65 milyar dan tahun 2010 Rp 24,20 milyar ini berarti meningkat sebesar Rp 4,44 milyar atau mengalami peningkatan sebesar 18,35% . Tetapi jika dilihat dari total Penerimaan Pendapatan tahun 2011 yaitu Rp 594,59 milyar dan tahun 2010 Rp 476,92 milyar. Ini berarti meningkat sebesar Rp 117,67 milyar atau sebesar 5,97 % . walaupun peningkatannya tidak signifikan tetapi diharapkan dapat membantu menunjang pembangunan Kabupaten Pasaman Barat. Dapat dilihat dari Total realisasi belanja untuk tahun 2011 Rp 557,40 milyar dan tahun 2010 Rp 490,64 milyar dimana mengalami peningkatan sebesar Rp 66,75 milyar atau sebesar 13,61% Meskipun dalam beberapa tahun terakhir ini total penerimaan pendapatan mengalami peningkatan yang cukup signifikan, namun dari penerimaan PAD Kabupaten Pasaman Barat sampai sekarang masih relatif rendah, karena masih banyak sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah yang harus digali dan dibina, sehingga merupakan hal yang sangat menarik untuk diadakan penelitian dengan Judul “Analisa Kinerja Keuangan Daerah Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2007 – 2012”.

Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Apakah Kabupaten Pasaman Barat Mandiri dalam melaksanakan kebijakan otonomi daerah.
2. Sejauhmana tingkat kemandirian Kabupaten Pasaman Barat setelah pemekaran.

Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui apakah Kabupaten Pasaman Barat Mandiri dalam melaksanakan kebijakan otonomi daerah.
2. Untuk mengetahui sejauhmana tingkat kemandirian Kabupaten Pasaman Barat setelah pemekaran.

METODE PENELITIAN

Data dan Sumber Data

Dalam penelitian ini data yang penulis gunakan bersumber dari:

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber data. Untuk memperoleh data atau informasi yang diharapkan sesuai dengan tujuan penelitian, maka disini penulis memilih beberapa orang informan yang dipilih secara purposive sampling, yaitu dipilih dengan pertimbangan dan tujuan tertentu, diantaranya:

- a. Kepala BAPPEDA (Bapak Drs. Yasri Uripsyah)
- b. Kepala BPS (Bapak Chardiman S.ST MM)
- c. Kepala Dispenda (Ibuk Maiyuslinar,SH)

Dalam penentuan jumlah informan, penulis juga menggunakan teknik . Para informan di atas merupakan informan awal yang penulis perkirakan akan dapat memberikan data atau informasi, tidak tertutup kemungkinan penulis akan menambah jumlah informan untuk memperoleh data atau informasi yang diperlukan dalam penelitian yang akan penulis lakukan.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi yaitu :

- a. Dokumen APBD Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2007 – 2012,
- b. Dokumen PDRB Kabupaten Pasaman Barat 2007 – 2012,
- c. Dokumen Pasaman Barat Dalam Angka (PBDA) tahun 2007 – 2012
- d. Dokumen Laporan Keuangan Pasaman Barat Tahun 2007-2012

Teknik dan Alat Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini, penulis memperoleh dan mengumpulkan melalui teknik observasi dan wawancara dengan menggunakan kamera sebagai bukti penulis memang benar-benar langsung mengumpulkan data dari BAPPEDA BPS dan DPKAD serta dari informan yang dipaparkan di atas. Dalam

melakukan penelitian, observasi yang dipakai yaitu observasi terus terang atau tersamar yang dikemukakan oleh Sanafiah Faisal dalam buku *metode penelitian bisnis*, Sugiono (2009:403). Pada observasi terus terang peneliti dalam melakukan pengumpulan data menyatakan terus terang kepada sumber data, tetapi justru saat peneliti juga tidak terus terang atau tersamar dalam observasi, hal ini untuk menghindari kalau data yang dicari merupakan data yang masih dirahasiakan.

Kemudian dalam penelitian ini penulis juga melakukan wawancara, jenis wawancara yang digunakan yaitu wawancara semiterstruktur yang dikemukakan oleh Esterbeg dalam Sugiono (2009:413).

Pendekatan-pendekatan yang penulis lakukan terhadap informan untuk memperoleh data yang dibutuhkan yaitu melalui kunjungan langsung ke Kantor informan.

Teknik Keabsahan Pemeriksaan Keabsahan data

Untuk memperoleh data yang akurat, terpercaya dan terjamin kebenarannya, maka penulis akan mencoba melakukan pemeriksaan keabsahan data melalui pendekatan diri kelapangan dengan wawancara yang lebih mendalam kepada informan yang dianggap dapat membantu peneliti dalam memperoleh data.

Menurut Densim dan maleong (2001:178) membedakan empat triangulasi yaitu triangulasi sumber, metode, penyidik dan teori. Namun yang dipakai dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber,metode dan teori yaitu dengan membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu, alat yang berbeda. Hal ini dilakukan dengan membandingkan data hasil pengamatan dan hasil wawancara. Dengan menggunakan metode triangulasi sumber,metode dan teori data yang diperoleh dapat disimpulkan setelah membandingkan data dari sumber, metode dan teori yang berbeda.

Teknik triangulasi yang penulis lakukan adalah dengan mencocokkan sumber,metode dan teori yang penulis peroleh dari observasi,wawancara dan studi kepustakaan. Dengan demikian bisa dilihat apakah sumber, metode dan teori yang diperoleh melalui wawancara sesuai dengan fakta dan kenyataan yang ada di lapangan. Baru dicocokkan dengan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan penelitian.

Teknik Analisa Data

Pada penelitian ini penulis akan menggunakan teknik analisa data yang dikemukakan oleh Spradley (1980) yang dikutip dari buku karangan Sugiyono yang berjudul *Metode Penelitian Bisnis* (2009:440) ada empat tahapan dalam menganalisis data yaitu:

1. Analisis Domain

Analisis domain pada umumnya dilakukan untuk memperoleh gambaran yang umum dan menyeluruh tentang situasi social yang sedang diteliti atau objek penelitian. Data diperoleh dari gran tour dan minitour guestion. Hasilnya berupa gambaran umum tentang objek yang diteliti, yang sebelumnya belum pernah diketahui. Dalam analisis ini informasi yang diperoleh belum mendalam, masih dipermukaan, namun sudah menemukan domain-domain atau kategori dari situasi sosial yang diteliti.

2. Analisis Toksonomi

Analisis toksonomi adalah analisis terhadap keseluruhan data yang terkumpul berdasarkan domain yang ditetapkan. Dengan demikian domain yang telah ditetapkan menjadi cover term oleh peneliti dapat diuraikan secara lebih rinci dan mendalam untuk mengetahui struktur internalnya melalui analisis taksonomi ini. Analisis taksonomi ini dilakukan dengan observasi terfokus. Hasil analisis taksonomi ini dapat disajikan dalam bentuk diagram kotak, diagram garis, simpul dan out line.

3. Analisis Komponensial

Pada analisis komponensial yang dilakukan adalah mencari ciri spesifik pada setiap struktur internal dengan cara mengontraskan antar elemen. Dilakukan melalui wawancara terseleksi dengan pertanyaan yang mengontraskan.

4. Analisis Tema Budaya

Analisis tema budaya dilakukan dengan mencari hubungan diantara domain dan bagaimana hubungan dengan keseluruhan dan selanjutnya dinyatakan ke dalam tema/judul penelitian.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**Hasil Penelitian****Rasio Kemandirian Keuangan Daerah**

Rumus yang digunakan untuk menghitung Rasio Kemandirian Keuangan Daerah adalah :

Rasio kemandirian:

Pendapatan Asli Daerah

Sumber Pendapatan dari Pihak Ekstern

Hasil perhitungan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah dapat dilihat dalam tabel 1 dan 2 berikut ini :

Tabel 1. Sumber Pendapatan Dari Pihak Ekstern

Keterangan	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Bagi hasil Pajak	22.728.762.117	26.142.176.577	26.163.248.853	27.272.983.270	24.514.023.626	28.513.457.305
Bagi hasil sumber daya Alam	834.096.254	354.172.501	959.978.582	794.282.455	1.433.315.522	1.777.882.537
DAU	271.069.000.000	305.576.071.000	323.123.275.000	350.371.158.800	437.992.674.720	457.694.684.000
DAK	41.263.000.000	46.718.000.000	50.344.000.000	50.123.700.000	43.920.825.000	52.908.300.000
Dana Penyesuaian	1.544.270.000	1.738.113.000	8.490.075.000	9.231.000.000	-	37.878.104.000-
Pendapatan Hibah	-	250.000.000	-	-	-	-
Dana Darurat	-	10.000.000.000	-	-	-	-
Lain-lain Pendapatan Dana BHP dari Prov	10.744.357.423	13.382.216.937	15.743.382.160	14.842.492.710	20.878.084.390	17.979.204.212
Dana BH lainnya dari Prov.	10.283.970.675	-	-	-	-	-
Jumlah	358.467.456.469	404.420.550.015	426.558.776.722	425.442.433.965	594.591.630.510	629.645.586.108,30

Sumber : Laporan Keuangan Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2007-2012

Tabel 2. Perhitungan Rasio Kemandirian Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2007-2012

No	TA	Total Pendapatan	Pendapatan Asli Daerah			Sumber Pendapatan Dari Pihak Ekstern			Rasio Kemandirian	Keterangan
			Rp	Perkem Bangan	%	Rp.	Perkem Bangan	%		
1	2007	378.102.536.635,92	18.802.136.593,92	-	5,19	358.467.456.469	-	94,81	5,48%	Instruktif
2	2008	424.976.790.752	19.766.935.765	4,69%	4,84	404.420.550.015	12,82%	95,16	5,08%	Instruktif
3	2009	450.016.293.338	23.457.766.616	14,11%	5,21	426.558.776.722	5,47%	94,79	5,50%	Instruktif
4	2010	476.920.282.646,95	24.205.105.536	3,18%	5,08	425.442.433.965	0,26%	89,21	5,69%	Instruktif
5	2011	594.591.630.510,75	29.038.490.732,7	18,35%	4,82	565.944.933.258	33,03%	95,18	5,06%	Instruktif
6	2012	629.645.586.108,30	32.850.806.054,3	13,43 %	5,16	596.751.632.054	5,44 %	94,77	5,44 %	Instruktif
		Rata-rata			5,05%		12,89%		5,36%	Instruktif

Sumber: Data diolah

Berdasarkan Tabel 2 terlihat bahwa PAD dan sumber pendapatan dari pihak intern selalu meningkat. PAD yang semula di tahun 2007 sebesar Rp. 19.635.080.166,92,- atau sebesar 5,19 % dari total pendapatan, selanjutnya pada tahun 2008 dan tahun 2009 PAD mengalami kenaikan sebesar Rp. 20.556.240.737,- dan

Rp23.457.516.616,- atau sebesar 4,84 % dan 5,21 % dari total pendapatan. Pada tahun 2010 dan tahun 2011 mengalami kenaikan kembali sebesar Rp. 24.204.865.411,95,- dan Rp28.646.697.252,- atau sebesar 5,08 % dan 4,8 % dari total pendapatan tahun 2012 kembali mengalami kenaikan sebesar Rp. 28.646.697.252, dan

menjadi 32.493.954.054,3, atau 4,82% naik menjadi 5,16 % sehingga rata-rata pertumbuhan PAD hanya sebesar 5,05 %.

Sumber pendapatan dari pihak ekstern juga mengalami peningkatan yang semula pada tahun 2007 sebesar Rp. 358.467.456.469,- atau 94,81 % dari total pendapatan, kemudian pada tahun 2008 dan tahun 2009 mengalami peningkatan sebesar 12,82% dan 5,47 % menjadi Rp. 404.420.550.015 dan Rp. 426.558.776.722 atau sebesar 95,16 % dan 94,79 % dari total pendapatan, lalu pada tahun 2010 mengalami penurunan menjadi Rp. 425.442.433.965,- atau 89,21 % dan tahun 2011 mengalami peningkatan Rp565.944.933.258 atau 95,18% dan tahun 2012 mengalami peningkatan Rp. 596.751.632.054 atau 94,77 % dari total pendapatan. Dari kenaikan diatas menjadikan rata-rata pertumbuhan sumber pendapatan dari pihak ekstern 12,89%

Pada rasio kemandirian mengalami peningkatan dan penurunan. Pada tahun 2007 rasio kemandirian mencapai 5,48% dan pada tahun 2008 mengalami penurunan menjadi 5,08

%. Selanjutnya pada tahun 2009 dan tahun 2010 naik menjadi 5,50 % dan 5,69 %. Sedangkan pada tahun 2011 mengalami penurunan menjadi 5,06 %. Dan mengalami kenaikan Tahun 2012 menjadi 5,44 % Sehingga rata-rata rasio kemandirian adalah sebesar 5,36 %.

Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal

Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$DF : \frac{PAD_t}{TPD_t} \times 100 \%$$

Keterangan :

DDF : Derajat Desentralisasi Fiskal

PAD_t : Total PAD tahun E

TPD_{t/APBD} : Total Pendapatan Daerah Tahun

Hasil perhitungan Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal dapat dilihat dalam Tabel 3 berikut ini :

Tabel 3. Kontribusi PAD terhadap APBD Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2007-2012

Tahun Anggaran	PAD (Rp)	APBD (Rp)	%	Kemampuan Keuangan
2007	18.802.136.593,9	378.102.536.635,92	5,19%	Sangat kurang
2008	19.766.935.765	424.976.790.752	4,84%	Sangat kurang
2009	23.457.766.616	450.016.293.338	5,21%	Sangat kurang
2010	24.205.105.536	476.920.282.646,95	5,08%	Sangat kurang
2011	29.038.490.732,7	594.591.630.510,75	4,82%	Sangat kurang
2012	32.850.806.054,3	629645586108,30	5,44 %	Sangat kurang
Rata-rata			5,05%	Sangat kurang

Sumber : Data diolah

Berdasar Tabel 3 terlihat bahwa Rasio Pendapatan Asli Daerah terhadap Total Pendapatan Daerah Kabupaten Pasaman Barat mengalami penurunan dan peningkatan yang relatif kecil. Pada tahun 2007 rasio derajat desentralisasi fiskal mencapai 5,19 % dan pada tahun 2008 mengalami penurunan menjadi 4,84 %, pada tahun 2009 dan tahun 2010 naik menjadi 5,21 % dan 5,08%. Kemudian pada tahun 2011 mengalami penurunan yaitu sebesar 4,82%. dan tahun 2012 mengalami kenaikan kembali menjadi 5,44 % Sehingga rata-rata Derajat Desentralisasi Fiskal adalah: 5,05%.

Rasio Indeks Kemampuan Rutin

Indeks Kemampuan Rutin dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

IKR :

$$\frac{PAD}{Total\ Pengeluaran\ Rutin} \times 100\%$$

Keterangan :

IKR : Indeks Kemampuan Rutin

PAD : Pendapatan Asli Daerah

Hasil perhitungan rasio Indeks Kemampuan Rutin dapat dilihat dalam Tabel 4.

Tabel 4 : Kontribusi PAD terhadap Pengeluaran Rutin Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2007-2012

Tahun Anggaran	PAD (Rp)	Pengeluaran Rutin (Rp)	%	Kemampuan Keuangan
2007	18.802.136.593,92	242.465.631.343	8,10%	Sangat kurang
2008	19.766.935.765	280.753.340.397	7,32%	Sangat kurang
2009	23.457.666.616	355.987.791.362	6,59%	Sangat kurang
2010	24.205.105.536	387.419.198.523	6,25%	Sangat kurang
2011	29.038.490.732,7	464.919.732.802	6,16%	Sangat kurang
2012	32.850.806.054,3	505.969.081.608,30	6,42 %	Sangat kurang
Rata-rata			6,80%	Sangat kurang

Berdasarkan Tabel 4 terlihat bahwa Rasio Pendapatan Asli Daerah terhadap Pengeluaran Rutin Daerah Kabupaten Pasaman Barat dari tahun ke tahun menunjukkan keadaan yang relatif tidak stabil dan selalu berubah-ubah. Pada tahun 2007 rasio Indeks Kemampuan Rutin mencapai 8,10 %, tahun 2008 dan 2009 turun menjadi 7,32

%. Dan 6,59% Selanjutnya pada tahun 2010 dan tahun 2011 mengalami penurunan 6,25 % dan pada tahun 2011 menjadi 6,16 %. Tahun 2012 naik menjadi 6,42 %.

Rasio Keserasian

Rasio keserasian yang digunakan dalam analisis ini menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Rasio Belanja Rutin} : \frac{\text{Total Belanja Rutin}}{\text{Total Belanja APBD}}$$

$$\text{Rasio Belanja Pembangunan} : \frac{\text{Total Belanja Pembangunan}}{\text{Total Belanja APBD}}$$

Hasil perhitungan analisis rasio keserasian dapat dilihat dibawah ini :

Tabel 5 : Belanja Rutin, Pembangunan dan Total APBD Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2007-2012

No	TA	Total Belanja (Rp)	Realisasi Belanja Rutin		Realisasi Belanja Pembangunan		Rasio Belanja Rutin	Rasio Belanja Pembangunan
			Rp.	Perkembangan	Rp.	Perkembangan		
1	2007	462.690.813.245	242.465.631.343	-	141.305.516.520	-	52,4%	30,53%
2	2008	471.690.316.752	280.753.340.397	15,79%	114.459.614.312	(19,00%)	59,52%	24,27%
3	2009	482.704.307.036	355.987.215.310	26,80%	123.311.307.302	7,73%	73,74%	25,55%
4	2010	490.644.127.523	387.419.198.567	8,83%	101.140.919.149	(17,98%)	78,96%	20,61%
5	2011	557.397.962.985	464.919.732.802	20,00%	88.860.334.361	(0,12)%	83,41%	15,94%
6	2012	659.738.868.987	505.969.081.608	8,82 %	150.888.247.379	69,80 %	76,69 %	22,87 %

Sumber: Data diolah

Dari hasil perhitungan Tabel 5 diatas, menunjukkan bahwa belanja rutin tahun 2007 sebesar Rp. 242.465.631.343,- mengalami kenaikan menjadi Rp. 280.753.340.397,- atau sebesar 15,79 % pada tahun 2008. Kemudian pada tahun 2009 dan tahun 2010 belanja rutin naik

menjadi Rp. 355.987.215.310,- dan Rp. 387.419.198.567,- atau sebesar 26,80 % dan 8,83%. Pada tahun 2011 kembali mengalami kenaikan menjadi Rp. 464.919.732.802,- atau sebesar 20 %. Sedangkan untuk belanja pembangunan masih belum stabil dari tahun ke

tahun. Pada tahun 2007 sebesar Rp.141.305.516.520,- turun ditahun 2008 menjadi Rp. 114.459.614.312,- atau sebesar 19 %. Kemudian pada tahun 2009 mengalami naik menjadi Rp. 123.311.307.302,- atau sebesar 7,73 %. Selanjutnya pada tahun 2010 turun menjadi Rp. 101.140.919.149,- atau sebesar (17,98 %) kemudian mengalami penurunan yang tajam pada tahun 2011 yaitu menjadi Rp. 88.860.334.361,- atau sebesar (0,12) %. Naik tahun 2012 jadi Rp. 150.888.247.379,- atau 22.87% .

Dari tabel diatas juga dapat dilihat rasio belanja rutin dan belanja pembangunan yang belum stabil. Pada tahun 2007 rasio belanja rutin dan rasio belanja pembangunan sebesar 52,4 % dan 30,53%. Sedangkan pada tahun 2008 rasio belanja rutin naik menjadi 59,52 % dan rasio belanja pembangunan turun menjadi 24,27 %. Selanjutnya pada tahun 2009 rasio belanja rutin dan rasio belanja pembangunan naik menjadi 73,74 % dan 25,55% Pada tahun 2010 rasio belanja rutin naik menjadi 78,96 % dan rasio

belanja pembangunan turun menjadi 20,61%. Kemudian pada tahun 2011 rasio belanja rutin naik menjadi 83,41 % dan dan rasio belanja pembangunan turun menjadi 15,94 %.kemudian tahun 2012 rasio belanja rutin turun menjadi 76,69 % tapi rasi belanja pembangunan naik menjadi 22,87 %

Rasio Pertumbuhan

Rumus yang digunakan untuk menghitung Rasio pertumbuhan adalah sebagai berikut :

$$r : \frac{P_n - P_o}{P_o} \times 100\%$$

Keterangan:

P_n : Data yang dihitung pada tahun ke-n

P_o : Data yang dihitung pada tahun ke-0

r : Pertumbuhan

Hasil perhitungan analisis rasio pertumbuhan dapat dilihat dalam Tabel 6 dibawah ini :

Tabel 6 : Rasio pertumbuhan APBD Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2007 - 2012

No	Keterangan	2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	PAD	18.802.136.593,92	19.766.935.765	23.457.666.616	24.205.105.536	29.038.490.732,7	32.850.806.054,3
2	Pertumb PAD	-	4,69%	14,11%	3,19%	18,35%	13,43%
3	Total Pendapatan	378.102.536.635,92	424.976.790.752	450.016.293.338	476.920.282.646,	594.591.630.510,7	629.645.586.108,3
4	Pertumb. Pdpt	-	12,39%	5,89%	5,98%	24,67%	5,89%
5	Biaya Rutin	242.465.631.343	280.753.340.397	355.987.791.363	387.419.198.523	464.919.732.802	505.969.081.608
6	Pertmbh. B. Rutin	-	15,79%	26,80%	8,83%	20,00%	8,82%
7	B. Pembangunan	141.305.516.520	114.459.614.312	123.311.307.302	201.140.919.149	88.860.334.361	150.888.247.379
8	Pertmb. B. Pembangunan	-	(19,00%)	7,73%	(17,98%)	(0,12%)	22,87%

Sumber: Data diolah

Dari perhitungan Tabel 6 diatas dapat diketahui bahwa pertumbuhan pendapatan asli daerah tahun 2007 sebesar Rp.18.802.136.593,92,- naik pada tahun 2008 menjadi Rp. 19.766.936.765,- atau sebesar 4,69%. Lalu pada tahun 2009 dan 2010 pendapatan asli daerah mengalami kenaikan menjadi Rp.23.457.666.616,- dan Rp.24.205.105.536,- atau sebesar 14,11 % dan 3,19 %. Kemudian pada tahun 2011 pendapatan asli daerah mengalami kenaikan menjadi Rp.29.038.490.732,3- atau sebesar 18,35 %. Dan tahun 2012 naik menjadi Rp. 32. 850.806.054,3 atau sebesar 13,45 %. Kenaikan rasio pertumbuhan pendapatan asli daerah lebih banyak dipengaruhi kenaikan pemungutan pajak dan retribusi daerah. Begitu juga untuk pertumbuhan pendapatan, pada tahun 2007 mengalami kenaikan dari Rp.378.102.536.635,92,- menjadi

Rp.424.976.790.752,- pada tahun 2008 atau sebesar 12,39 %. Pada tahun 2009 rasio pertumbuhan pada total pendapatan mengalami peningkatan pertumbuhan sebesar 5,89% atau sebesar Rp.450.016.293.338,- pada tahun 2010 dan tahun 2011 rasio pertumbuhan pendapatan juga mengalami peningkatan yaitu dari Rp.476.920.282.646,95,- menjadi Rp.594.591.630.510,75,- atau sebesar 5,98% tahun 2010 dan 24,67 % tahun 2011.

Pada rasio pertumbuhan belanja rutin mengalami kenaikan pada tahun 2007 sebesar Rp.242.465.631.343,- menjadi Rp.280.753.340.397,- pada tahun 2008 atau sebesar 15,79 %. Pada tahun 2009 dan 2010 belanja rutin kembali naik menjadi Rp.355.987.791.363,- dan Rp.387.419.198.523,- atau sebesar 26,80 % dan 8,83 %. Kemudian pada tahun 2011 juga mengalami kenaikan menjadi

Rp.464.919.732.802,- atau sebesar 20 %. Kemudian naik tahun 2012 menjadi Rp 505.969.081.608. atau sebesar 8.82 %

Pada rasio perkembangan belanja pembangunan juga mengalami kenaikan dan penurunan. Pada tahun 2008 mengalami penurunan yang semula Rp.141.305.516.520,- menjadi Rp.114.459.614.312,- atau sebesar (19%). Selanjutnya pada tahun 2009 naik menjadi Rp.123.311.307.302,- atau sebesar 7,73 %. Sedangkan pada tahun 2010 juga naik yaitu Rp.201.140.919.149 ,- atau (17,98 %), Untuk tahun 2011 mengalami penurunan Rp.88.860.334.361,- atau sebesar (0,12%). Untuk tahun 2012 mengalami kenaikan menjadi 150.888.247.379 atau (22,87 %).

PEMBAHASAN

Menurut analisis rasio diatas dapat disimpulkan bahwa rasio kemandirian selama enam tahun pada Kabupaten Pasaman Barat memiliki rata-rata tingkat kemandirian masih rendah dan dalam kategori kinerja keuangan kurang dengan pola hubungan instruktif yaitu peranan pemerintah pusat sangat dominan dari pada daerah, hal ini dapat dilihat dari rasio kemandirian / kemampuan yang dihasilkan masih antara 0-25 %. Rasio kemandirian yang masih rendah mengakibatkan kinerja keuangan daerah Kabupaten Pasaman Barat dalam membiayai pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan masih sangat tergantung pada penerimaan dari pemerintah pusat.

Rasio kemandirian yang masih rendah dapat disebabkan pada sumber penerimaan daerah dan dasar pengenaan biaya, tampaknya Pendapatan Asli Daerah masih belum dapat diandalkan bagi daerah untuk otonomi daerah, ini disebabkan karena basis pajak belum tertata dengan baik atau belum terdata dengan baik maka penerimaan daerah masih jauh dari apa yang di harapkan oleh otonomi daerah, begitu juga dengan retribusi daerah belum terdata dengan baik dan juga kurang sosialisasi ditengah masyarakat sekaligus sarana prasaran yang belum mendukung akibatnya pendapatan dari retribusi masih kecil , karena relatif rendahnya basis pajak / retribusi yang ada di daerah dan kurangnya pendapatan asli daerah yang dapat digali oleh pemerintah daerah. Hal ini dikarenakan sumber-sumber potensial untuk menambah Pendapatan Asli Daerah masih dikuasai oleh pemerintah pusat. Sedangkan untuk basis pajak yang cukup besar masih dikelola oleh pemerintah pusat, yang di dalam pemungutan / pengenaannya berdasarkan undang-undang / peraturan pemerintah, dan daerah hanya menjalankan serta akan menerima bagian dalam

bentuk dana perimbangan. Dana perimbangan itu sendiri terdiri dari : Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil Bukan Pajak / SDA, DAU, DAK, penerimaan lainnya.

Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah daerah harus mampu mengoptimalkan penerimaan dari potensi pendapatannya yang telah ada. Inisiatif dan kemauan pemerintah daerah sangat diperlukan dalam upaya meningkatkan PAD. Pemerintah daerah harus mencari alternatif-alternatif yang memungkinkan untuk dapat mengatasi kekurangan pembiayaannya, dan hal ini memerlukan kreatifitas dari aparat pelaksana keuangan daerah untuk mencari sumber-sumber pembiayaan baru baik melalui program kerjasama pembiayaan dengan pihak swasta dan juga program peningkatan PAD misalnya pendirian BUMD sektor potensial.

Dilihat dari hasil Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal selama enam tahun pada pemerintahan Kabupaten Pasaman Barat masih dalam skala interval yang sangat kurang, karena masih berada dalam skala interval antara 0,00-10,00 yaitu sebesar 5,05 % dan ini berarti bahwa PAD mempunyai kemampuan yang sangat kurang dalam membiayai pembangunan daerah. Hal ini terjadi karena PAD di Kabupaten Pasaman Barat masih relatif kecil dibandingkan dengan Total Pendapatan Daerah dan Kabupaten Pasaman Barat dalam membiayai pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan masih sangat tergantung pada sumber keuangan yang berasal dari pemerintah pusat.

Rasio Indeks Kemampuan Rutin selama enam tahun pada pemerintahan Kabupaten Pasaman Barat masih dalam skala yang sangat kurang, karena masih berada dalam skala interval antara 0,00-20,00 yaitu sebesar 6,80 % dan ini berarti bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) mempunyai kemampuan yang kurang untuk membiayai pengeluaran rutin, hal ini terjadi karena PAD Kabupaten Pasaman Barat sangat kecil, dan selama ini lebih banyak tergantung pada sumber keuangan yang berasal dari pemerintah pusat.

Dari hasil analisis rasio keserasian dapat disimpulkan bahwa sebagian besar dana yang dimiliki pemerintah daerah masih diprioritaskan untuk kebutuhan belanja rutin sehingga rasio belanja pembangunan terhadap Realisasi APBD relatif kecil. Ini dapat dibuktikan dari rasio belanja rutin yang selalu lebih besar dari rasio belanja pembangunan dan tingkat pertumbuhan belanja rutin jauh lebih besar dari pada tingkat pertumbuhan belanja pembangunan. Besarnya alokasi dana untuk belanja rutin terutama dikarenakan besarnya dinas-dinas otonomi dan

belanja pegawai untuk gaji PNS. Dengan ini dapat menunjukkan pemerintah Kabupaten Pasaman Barat yang lebih condong pada ekonomi kerakyatan belum memperhatikan pembangunan daerah, walaupun belanja pembangunan yang selalu naik meskipun relatif kecil. Hal ini dikarenakan belum ada patokan yang pasti untuk belanja pembangunan, sehingga pemerintah daerah masih berkonsentrasi pada pemenuhan belanja rutin yang mengakibatkan belanja pembangunan untuk pemerintah Kabupaten Pasaman Barat kecil atau belum terpenuhi.

Sedangkan dari rasio pertumbuhan dapat dikatakan bahwa kondisi pertumbuhan realisasi APBD Kabupaten Pasaman Barat dapat disimpulkan bahwa realisasi APBD pada tahun anggaran 2007-2012 menunjukkan pertumbuhan rata-rata yang positif meskipun ada kecenderungan pertumbuhannya semakin berkurang. Hal ini dapat dilihat dari rasio belanja pembangunan tahun 2012.

KESIMPULAN

1. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis maka Kinerja keuangan daerah di lihat dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), selalu terjadi peningkatan Pendapatan setiap tahunnya. Namun dari target dan realisasi pendapatan seperti terlihat dari laporan realisasi PAD Kabupaten Pasaman Barat tahun 2007 terealisasi 98,63 %. Dan tahun 2008 terealisasi 92,79 % , terjadi penurunan namun jumlah (PAD) meningkat tahun 2007 Rp.18.802 M menjadi Rp.19.766 M , tahun 2009,terjadi peningkatan target terealisasi 98,25 % , (PAD) meningkat menjadi Rp. 23.457 M, dan tahun 2010, terjadi penurunan target terealisasi menjadi 86,26 % , namun jumlah (PAD) meningkat menjadi Rp.24.205 M, dan tahun 2011 terjadi peningkatan (PAD) menjadi Rp. 29.038 M, dan terjadi peningkatan target terealisasi 98,56 % serta tahun 2012 terjadi penurunan target (PAD) terealisasi sebesar 88,76 %. Dari target yang di rencanakan, namun jumlah Pendapatan terjadi peningkatan menjadi Rp. 32.850 M.
2. Berdasarkan hasil penelitian bahwa pendapatan asli daerah yang paling dominan atau besar kontribusinya adalah dari pajak penerangan jalan memberikan kontribusi terhadap (PAD) sebesar 11,23 % , dan yang kedua adalah Pajak Restoran memberikan kontribusi terhadap (PAD) 3,40 % ,Pajak sarang burung walet sebesar 3,20 % . Dan dari retribusi yang paling besar kontribusinya adalah retribusi pelayanan

kesehatan (RSUD) memberikan kontribusi sebesar 4,5 % , serta legalisasi daerah 3,91 % dan dari pendapatan lain yang sah yaitu pendapatan jasa giro sebesar 26,08 % dan pendapatan bunga deposito sebesar 16,23 % , sementara yang paling kecil kontribusinya adalah dari pajak hotel dan hiburan serta izin usaha perikanan setiap tahunnya tidak mencapai target.

SARAN

Berdasarkan hasil analisis data dan kesimpulan tentang kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat, maka penulis menyarankan hal-hal sebagai berikut:

1. Pelaksanaan otonomi daerah sebagaimana dinyatakan dalam UU Nomor 22 tahun 1999 dan UU Nomor 32 tahun 2004, sangat diperlukan Peningkatan Kinerja Keuangan Daerah agar tingkat ketergantungan keuangan daerah kepada pemerintah pusat dapat dikurangi melalui intensifikasi Pendapatan Asli Daerah yang dilakukan oleh masing-masing daerah.
2. Mengingat terbatasnya jumlah dan jenis sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah, maka diperlukan penyerahan beberapa sumber keuangan nasional yang potensial untuk dikelola dan dipungut sendiri oleh daerah dan menjadi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
3. Diharapkan kepada pemerintah dari sekian banyak pajak dan retribusi daerah pemerintah harus terus berupaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia serta melengkapi sarana prasarana pendukung untuk keberhasilan kegiatan pemungutan pajak maupun retribusi.
4. Upaya konkrit dari Pemerintah Daerah dengan jalan Publikasi serta Sosialisasi di tengah masyarakat supaya timbul kesadaran serta partisipasi masyarakat tentang pajak dan retribusi.
5. Pemerintah harus menganggarkan dana untuk pemberian Reward kepada masyarakat yang patuh dan tepat waktu pembayaran Pajaknya.

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pasaman Barat dan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yayasan Pendidikan Pasaman serta semua pihak yang membantu dalam penyelesaian penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim, 2001. *Manajemen Keuangan Daerah*, Yogyakarta, UPP YKPN.
- Helbert, Erich, 2000. *Teknik Analisa Keuangan*, Jakarta. Erlangga.
- Maleong J. Lexy. 2005. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung. PT. Remaja Rosda Karya.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011 tentang *Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah*.
- Sugioyono, 2009. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta
- UU RI 2004 Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah daerah.